

Tentang Ide Reformasi Dalam Islam

oleh Gaby Faimau* - Bristol, Inggris

Abstract

Does Islam need a reformation? Does Islam need to go through a period of enlightenment? These questions are two common questions in the modern studies of Islam and Muslim societies, particularly in the contemporary Western academic world. Interestingly, the history of Christianity is often cited as a point of reference or a point of departure in the discussions of such questions. Christian or Western framework is therefore unavoidably used to frame the history and progress in Islam. What has often been neglected is the fact that Muslim societies in fact have gone through their own particular cycle of reformation or renewal. Drawing upon the observation of Ibnu Khaldun (1332-1406), a notable Arabic historian, on the renewal cycle within Muslim societies six hundred years ago, this article discusses in a simple way the idea of reformation in Islam.

Keywords: Islam, reformasi, pencerahan, Ibnu Khaldun, politik.

Mereka yang belajar tentang Islam kontemporer di dunia Barat sering berhadapan dengan pertanyaan, “Perlukah sebuah reformasi atau pencerahan untuk Islam?” Umumnya referensi utama pertanyaan ini adalah perjalanan reformasi yang dilalui kekristenan dan abad pencerahan yang mengantar dunia Barat pada ide seputar kemajuan dan modernitas. Dengan kata lain, ketika pertanyaan ini diajukan, reformasi dan pencerahan yang dimaksud adalah reformasi model kekristenan dan pencerahan ala Barat. Masalahnya, ini kerap bisa dipertanyakan: bagaimana mungkin bingkai sejarah kekristenan dan dunia Barat bisa dipakai untuk menakar atau bahkan menghakimi perjalanan peradaban lain seperti peradaban Islam?

Ide reformasi atau pembaharuan sebetulnya bukan hal baru dalam masyarakat Islam. Ibnu Khaldun (1332-1406), seorang sejarawan Arab kenamaan, dengan jeli sudah mencatat siklus reformasi dalam masyarakat Islam enam ratus tahun yang silam. Di dalam bukunya berjudul, *The Muqaddimah*, dengan menarik Ibnu Khaldun menguraikan bahwa masyarakat Muslim selalu berkembang mengikuti dua siklus yang datang silih berganti yakni periode tatkala ajaran agama diikuti dan dipatuhi secara sangat ketat dan periode di mana

* Peneliti dan mahasiswa PhD pada Centre for the Study of Ethnicity and Citizenship, Departemen Sosiologi, Universitas Bristol, U.K.

perhatian terhadap ajaran agama tampak longgar meskipun sejumlah praktek devosional tetap diperhatikan (Khaldun, 1958).

Pengamatan Ibnu Khaldun didasarkan atas struktur masyarakat dunia Arab di awal millennium kedua saat itu. Menurut Ibnu Khaldun, saat itu masyarakat Arab dibentuk dua kelompok besar yakni penduduk perkotaan dan kaum nomaden. Dinamika kedua kelompok ini dalam urusan tata hidup bersama ternyata dengan sangat menarik menggambarkan hubungan antara praktek kekuasaan dan ikatan nilai religius. Di satu pihak, ada penduduk perkotaan yang tinggal di kota dengan akses pada lahan dan tanah yang subur termasuk akses untuk berbagai kemajuan. Sementara itu di pihak lain ada kaum nomaden yang menempati daerah gurun tandus dengan pola hidup berpindah-pindah. Dalam sistem dan tata pemerintahan, pemangku kekuasaan berada di wilayah perkotaan. Meskipun demikian, wilayah kekuasaannya merangkum pula kaum nomaden di padang gurun. Kedua kelompok ini jelas sangat berbeda. Tetapi Ibnu Khaldun mencatat bahwa ada satu hal yang mengikat dan menjadi daya perekat kedua kelompok ini yakni iman dan keyakinan mereka dalam Islam.

Lalu bagaimana siklus reformasi atau pembaharuan terjadi? Sebagaimana kerap terjadi, kaum kosmopolitan di kota kerap gampang jatuh dan mudah meninggalkan pegangan-pegangan moral dengan kendali agama ketika mereka terpukau oleh gaya hidup perkotaan. Akibatnya dekadensi moral terjadi, sistem hidup masyarakat terbengkalai, tata pemerintahan tak terarah dan hidup ekonomi berantakan. Sementara itu, kaum nomaden, menurut Ibnu Khaldun, sudah sangat terbiasa dengan tantangan dan kerasnya alam. Secara alamiah, mereka sudah terlatih dengan tandus dan gersangnya padang gurun. Itulah sebabnya, apapun yang terjadi, tantangan dan pengaruh perubahan sulit menyusup ke dalam sendi-sendi hidup mereka. Dengan kata lain, mereka mempunyai ‘kekebalan alamiah’ dan ketaatan mereka atas kaidah-kaidah moral yang diatur dalam agama tampak lestari. Gara-gara cara hidup perkotaan yang gampang terpukau oleh lihai dan gemerlap suasana kota, hampir dapat dipastikan seorang pembaharuan akan bangkit untuk kembali menegakkan tata kehidupan masyarakat sehingga kembali berpegang pada kendali nilai-nilai moral. Apa yang lalu terjadi? Yang terjadi adalah, ketika seorang reformis atau pembaharuan bangkit, kaum nomaden ini biasanya cepat dilirik untuk bergabung dalam dunia militer atau ketentaraan. Saat pembaharuan ini menang dengan bantuan kaum nomaden, penduduk perkotaan akan digiring lagi kepada praktek dan cara hidup yang ketat di bawah tuntunan agama. Reformasi pun terjadi. Meskipun demikian, reformasi ini tidak kekal sifatnya. Reformasi, menurut Ibnu Khaldun, paling-paling dipertahankan dalam beberapa generasi. Sesudah itu, penduduk perkotaan akan jatuh lagi dalam gemerlap gaya hidup kota dan siklus yang sama akan terulang lagi.

Robert Hefner, seorang Indonesianis dan pengajar di Universitas Boston, menggunakan model masyarakat Islam yang disoroti Ibnu Khaldun saat mengamati Islam dan peristiwa 11 September 2001 (<http://www.ssrc.org/sept11/essays/hefner.htm>). Menurut Hefner, model yang diajukan Khaldun tidak sepenuhnya terjadi di semua masyarakat Islam terutama karena di bagian dunia seperti Mesopotamia, Asia Tenggara atau Turki, hidup nomadik tidak ada. Meskipun demikian, pengamatan Khaldun seputar model reformasi Islam masih sangat cocok untuk Islam kontemporer dewasa ini. Ini bisa dilihat misalnya dalam gerakan-gerakan pembaharuan Islam yang tampak dalam usaha sejumlah pemimpin dan pengkhotbah Muslim yang menghubungkan dan menafsir secara sangat ketat ajaran agama dan ayat-ayat Kitab Suci sambil menuju praktek-praktek hidup kelas sosial tertentu. Ketika ini terjadi, yang bisa diharapkan adalah sebuah strategi memperketat kesalehan hidup dengan maksud membawa sebuah pembaharuan atau bahkan perubahan hidup sosial politik.

Dinamika reformasi Islam yang disoroti Ibnu Khaldun bisa kita ingat kembali menyusul publikasi buku yang ‘menarik’ tetapi juga ‘menantang’ berjudul *Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia* (Wahid, 2009). Saat tulisan ini ditulis, sejumlah peneliti yang namanya diikutkan dalam buku yang diedit KH. Abdurrahman Wahid ini tengah memprotes tentang klaim keterlibatan mereka dalam dua tahun penelitian untuk materi buku ini. Meskipun demikian, secara menyeluruh, pembaca bisa menangkap dengan jelas dan gamblang pesan tarik menarik antara kelompok Islam garis keras dan kelompok Islam moderat di Indonesia.¹

Hemat saya, secara global kedua kelompok ini sebenarnya sama-sama menghendaki pembaharuan Islam namun mengajukan dan menempuh jalan yang berbeda. Kelompok garis keras melihat bahwa pembaharuan Islam hanya mungkin bila semua tata cara kehidupan dan penyelenggaraan hidup bernegara diatur menurut hukum Islam. Dalam tataran dan ranah politik, konsekuensinya jelas. Di sini, negara tidak hanya harus berbasis Islam tetapi harus menjadi negara Islam atas dasar hukum Shari'a. Penganut cara pikir ini berpandangan bahwa di luar bentuk negara seperti ini, pembaharuan tidak bisa terjadi. Atau, di luar negara Islam, tak ada pembaharuan Islam. Ideologi ini biasanya cepat dan

1 Saya menggunakan istilah ‘kelompok’ untuk menyederhanakan catatan singkat dalam tulisan ini seputar reformasi dalam Islam. Sementara menunjuk pada kedua kelompok untuk menegaskan adanya dua bentuk filsafat dan pemikiran yang tengah berkembang dalam Islam, saya juga mengakui bahwa Muslim tidak bisa dengan begitu saja diklasifikasi sebagai kelompok sosiologis, karena kategori semacam ini bisa dengan gampang memberi kesan generalisasi seolah-olah Islam itu monolitis.

gampang mendapat perhatian serta pengikut. Mengapa? Hemat saya, ada dua strategi yang biasa diikuti. Strategi pertama bisa kita sebut strategi populisme.² Dalam strategi ini, para pemimpin secara terus menerus mengklaim diri sebagai ‘penyambung lidah umat’ dan pada saat yang sama, umat ‘diikat’ secara emosional pada ideologi yang mau dikembangkan. Keterikatan secara emosional ini serta merta memperkuat rasa perlawanan atas cara pikir dan cara hidup lain yang berbeda dengan ideologi dan cara pikir yang mereka anut. Dunia lalu dipetakan menjadi dua: dunia hitam putih. Ini misalnya tampak dalam klaim bahwa dunia Muslim dan dunia non-Muslim akan senantiasa ada dalam status perang sampai hukum Shari'a ditegakkan. Strategi kedua yang dipakai adalah ‘menyerang musuh yang jauh’. Strategi ini gampang terlihat. Di era modern, yang selalu menjadi sasaran serangan adalah Amerika Serikat dan dunia Barat. Buku *Ilusi Negara Islam* menunjukkan misalnya tentang kaum garis keras yang terus saja mengkritik dunia Barat dan Amerika Serikat termasuk kucuran dana untuk sejumlah proyek di Indonesia, sementara mereka gagal mengkritik kucuran dana yang mereka terima dari dunia Arab. Di sini ‘musuh yang jauh’ hanya dipakai sebagai kambing hitam untuk meraup dukungan internal atau paling tidak mengelabui publik tentang sejumlah strategi atau kebijakan internal.

Kelompok kedua yakni kelompok moderat kerap juga disebut kelompok liberal, neomodernis atau demokrat. Mereka juga menginginkan pembaharuan Islam. Tetapi ide pembaharuan di kalangan Muslim democrat lebih tertuju pada pembaharuan internal. Di dalam cara pikir ini, ide iman dan praktek hidup Islamiah dipandang sejalan dan tidak bertentangan dengan demokrasi, aturan main, kebebasan hidup sipil dan hidup berdampingan dengan kelompok lain yang berbeda secara budaya, agama maupun ideologis. Buku Abdullahi An-Na'im berjudul *Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Shari'a* yang terbit tahun 2008 dengan tajam menggarusbahagi ide ini.³ Di dalam buku yang mendapat perhatian sangat luas ini, An-Na'im tidak tanggung-tanggung

-
- 2 Strategi populisme digunakan sebagai taktik paling jitu oleh Osama bin Laden. Analisis tentang bagaimana Osama bin Laden menggunakan politik populisme untuk meraup dukungan kalangan Islam bisa dilihat dalam Steger, M.B. (2008), *The Rise of the Global Imaginary: Political Ideologies from the French Revolution to the Global War on Terror*, Oxford: Oxford University Press. Yang menarik dalam strategi populisme adalah, rakyat hanya diperalat sebagaimana kaum nomaden dipakai dalam model yang diterangkan Ibnu Khaldun.
 - 3 An-Na'im, A. (2008), *Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Shari'a*, Cambridge: Harvard University Press. Buku ini mendapat sambutan hangat di kalangan akademisi dan peminat studi Islam kontemporer. Diskusi dan debat luas seputar buku ini dapat dibaca dalam website Social Science Research Council: <http://www.ssrc.org>.

berpendapat bahwa bila Islam mau berkembang dan mendapat tempat dalam hidup publik, negara sekular adalah model tata kenegaraan paling bagus. Bagi An-Na'im, komitmen umat Islam untuk hukum Islam jelas tidak bisa dipertanyakan. Meskipun demikian, komitmen umat Islam untuk hukum Islam tidak harus disertai dengan pembentukan negara Islam. Dia lalu menegaskan bahwa negara sekular adalah model dengan bingkai paling tepat yang bisa memungkinkan kaidah-kaidah dan norma Islam bertumbuh dan berkembang dengan baik. Mengapa? An-Na'im memaparkan tiga argumen yang sangat menarik. Pertama, institusi religius dan negara secara efektif sebenarnya sudah terpisah sejak wafatnya Nabi Muhammad. Kedua, tuntutan kaum Islamis yang menghendaki pembauran negara dan agama secara mendasar tidak merefleksikan ajaran Islam. Ide pembauran negara dan agama yang dikemukakan kelompok Islamis justru sebaliknya memperkuat wacana postcolonial yang mengembangkan argumen atas premis dasar hubungan tak terpisahkan antara negara dan hukum positif. Ketiga, hal-hal paling ideal dalam Shari'a paling bagus ditemukan dalam wadah negara sekular karena negara sekular netral dalam urusan agama. Dengan demikian, perhatian kepada hak-hak warga negara dan hak-hak sipil terjamin untuk setiap warga negara apapun latar belakangnya.

Sewaktu Samuel Huntington muncul dengan analisisnya seputar '*clash of civilizations*' atau benturan peradaban, tidak sedikit pengamat sosial politik yang mencibir analisis ini. Ada yang bahkan menuduh analisis ini sebagai analisis provokatif yang mungkin malah memotivasi benturan peradaban khususnya benturan peradaban Islam dan Barat menjadi kenyataan. Tetapi menyusul terjadinya peristiwa 11 September 2001, para pengamat ini tampak bungkam seolah mereka sedang menyaksikan terpenuhinya 'ramalan nabi' Huntington. Itulah sebabnya, dalam analisis kontemporer tentang Islam, ide benturan peradaban hampir selalu disertakan. Ada yang bahkan menganggap Islam sebagai 'musuh baru' menyusul runtuhan tembok Berlin. Sementara sejumlah analis dan pengamat masih terus melihat kemungkinan benturan peradaban Barat dan Islam dan bagaimana mengatasinya, gambaran tentang situasi internal Islam dan ide pembaharuan Islam seperti dipaparkan di atas bisa dengan mudah dibaca sebagai 'benturan internal dalam tubuh Islam'. Benturan ini hampir bisa dipastikan akan mempengaruhi dinamika hidup politik baik politik lokal maupun internasional dan transnasional. Di tingkat nasional, hemat saya, transformasi politik ke depan di negara-negara dengan penduduk Muslim sebagai mayoritas termasuk Indonesia, akan tergantung pada dua hal yakni tarik menarik antara dua kelompok ini dan kemampuan komunitas nasional dan internasional untuk memberi dan memperluas wadah bagi sebuah wacana yang berpihak pada kemanusiaan universal dengan ide-ide global seperti demokrasi, kemiskinan global, kebebasan, hak-hak sipil, lingkungan hidup dan perubahan iklim.

DAFTAR PUSTAKA

- Khaldun, I. (1958), *The Muqaddimah*, New York: Pantheon.
- Wahid, A. (ed.) (2009), *Ilusi Negara Islam: Expansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia*, Jakarta: The Wahid Institute.
- Steger, M.B. (2008), *The Rise of the Global Imaginary: Political Ideologies from the French Revolution to the Global War on Terror*, Oxford: Oxford University Press.
- An-Na'im, A. (2008), *Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Shari'a*, Cambridge: Harvard University Press.
- Hefner, R., "September 11 and the Struggle for Islam", SSRC. <http://www.ssrc.org/sept11/essays/hefner.htm>